PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

1. PROFIL INOVASI

1.1 Nama Inovasi

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

1.2 Tahapan Inovasi

penerapan

1.3 Inisiator Inovasi Daerah

opd

1.4 Jenis Inovasi

digital

1.5 Bentuk Inovasi Daerah

inovasi tata kelola pemerintahan daerah

1.7 Urusan Inovasi Daerah

Sekretariat daerah

1.8 Waktu Uji Coba

2022-09-12

1.9 Waktu Penerapan

2022-12-29

1.10 Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang Dilakukan

1. **RANCANG BANGUN**
2. **DASAR HUKUM**

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standart Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kabupaten Mimika.

8. Keputusan Bupati Nomor 193 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran atas Lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengeloaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

9. Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum.

1. **PERMASALAHAN**
2. Makro

3. **Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan**

   Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal.

4. **Ketidaklengkapan**

   Tidak semua peraturan atau dokumen hukum tersedia di dalam JDIH. Salah satu contoh adalah Peraturan Kampung. Keterbatasan ini memengaruhi kualitas informasi yang tersedia.

5. **Tantangan Pengelolaan dan Penyusunan Dokumen Hukum**: Penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum memerlukan keahlian khusus, sehingga perlu adanya pelatihan dan koordinasi antar instansi untuk memastikan semua dokumen hukum tersusun dengan baik, lengkap, dan mudah diakses.

6. **Rendahnya Tingkat Sosialisasi**

   Masyarakat, terutama di luar kalangan praktisi hukum, belum sepenuhnya sadar akan keberadaan dan manfaat JDIH. Sosialisasi yang kurang optimal membuat JDIH belum dimanfaatkan secara maksimal.

7. **Kurangnya Pemahaman Pengguna**

   Pengguna yang tidak terampil dalam mencari dan menggunakan informasi hukum dalam JDIH sering kali merasa kesulitan dalam mengakses dokumen yang mereka perlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap cara kerja sistem atau tata cara pencarian yang efisien.

8. **Akses yang Terbatas**

   Untuk melindungi kerahasiaan, beberapa dokumen hukum mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik, atau hanya sebagian informasi yang tersedia, sehingga mengurangi transparansi.

9. Mikro

    1. **Aksesibilitas dan Keterbatasan Infrastruktur**

       Banyak JDIH di instansi pemerintah atau lembaga hukum yang masih bergantung pada sistem yang kurang memadai, baik dari sisi perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). Akses ke informasi hukum bisa terhambat jika infrastruktur jaringan tidak stabil atau jika sistem informasi yang digunakan tidak terintegrasi dengan baik.

    2. **Kurangnya Sosialisasi dan Penggunaan**

Meskipun JDIH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai keberadaan JDIH membuat banyak pihak (termasuk masyarakat dan aparatur hukum) tidak memanfaatkan sistem ini secara maksimal.

3. **Ketergantungan pada Sistem Manual**

   Beberapa instansi masih mengandalkan sistem manual dalam mengelola informasi hukum, seperti pencatatan peraturan secara fisik atau dalam bentuk arsip kertas. Hal ini dapat memperlambat proses pencarian dan pembaruan data, serta meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan data.

1. **ISU STRATEGIS**
   1. **Global**

Isu global terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) mencakup tantangan dalam peningkatan literasi hukum, integrasi data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa isu utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan JDIH:

1. **Peningkatan Literasi Hukum di Masyarakat**

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi hukum di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi hukum dan pendidikan hukum yang memadai. Untuk itu, JDIH berperan penting dalam menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

1. **Integrasi dan Standarisasi Data Hukum**

   Perlu adanya integrasi nasional database pengelolaan dokumentasi hukum yang tertib dan berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap, akurat, dan dapat diakses dengan mudah. Standarisasi dalam penyusunan indeks, pelayanan informasi hukum, dan pelaporan penyelenggaraan JDIHN menjadi penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan efektif.

2. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan JDIH**

   Transformasi digital menjadi kunci dalam pengelolaan JDIH yang efektif. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan pengelolaan dokumen hukum secara lebih efisien, validasi dokumen, dan asistensi pengelolaan JDIH.Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mendukung perencanaan pembangunan.

3. **Tata Kelola Data dan Keamanan Informasi**

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola data yang baik, seperti standar, metadata, interoperabilitas, dan keamanan data, sangat penting dalam pengelolaan JDIH. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan tidak hanya lengkap dan akurat, tetapi juga aman dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dengan mengatasi isu-isu tersebut, JDIH dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas.

1. **Nasional**

Isu nasional terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Indonesia pada tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa tantangan dan langkah strategis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

1. **Peningkatan Literasi dan Kepatuhan Hukum melalui Tata Kelola JDIH**

   Pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2024, tema besar yang diangkat adalah "JDIHN Berkualitas Meningkatkan Literasi dan Kepatuhan Hukum". Acara ini menyoroti pentingnya tata kelola data yang baik serta peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat. Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Woro Titi Haryanti, menyatakan bahwa pelaksanaan good governance atau tata kelola yang baik sangat penting dalam mendukung peningkatan literasi hukum. Menurutnya, diseminasi dokumen hukum secara masif melalui JDIH menjadi kunci dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Mahfudh Ahmad, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia, juga mengungkapkan pentingnya pengelolaan data dokumen hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. JDIHN harus menjadi satu-satunya portal data hukum dengan dukungan dari institusi anggota, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti standar, metadata, interoperabilitas, kode referensi data, dan data induk dalam pengelolaannya.

2. **Tantangan dalam Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada JDIH**

   Implementasi SPBE pada JDIH menghadapi tantangan dalam hal pematangan standar operasional bisnis, tata kelola yang mencakup keamanan data, arsitektur data, dan referensi data. Mahfudh Ahmad menekankan perlunya backup dan recovery data yang handal sebagai prioritas bagi pengelola JDIH. Penyusunan sistem yang baik harus mempertimbangkan kemampuan untuk memulihkan data secara cepat dan akurat jika terjadi kehilangan data, agar keberlangsungan informasi hukum tetap terjamin.

3. **Peran JDIH dalam Mendukung Demokrasi dan Pemberantasan Korupsi**

   Dalam konteks demokrasi, korupsi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan. JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan informasi hukum yang transparan dan akuntabel, yang dapat membantu masyarakat dalam mengawasi dan mencegah praktik korupsi.

1. **Lokal**

    1. Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada

tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia. Penghargaan ini mencerminkan kualitas dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan informasi hukum kepada Masyarakat. Namun, meskipun telah mencapai prestasi tersebut, Kabupaten Mimika menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan JDIH. Salah satu kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang masih kurang memadai, sehingga berdampak pada aksesibilitas dan efisiensi pengelolaan dokumentasi hukum. Selain itu, JDIH Kabupaten Mimika juga mengalami kesulitan dalam meningkatkan visibilitas situs web mereka di mesin pencari, seperti Google, yang mempengaruhi seberapa mudah masyarakat dapat mengakses informasi hukum yang tersedia.

1. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan berbagai upaya, termasuk kunjungan ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan JDIH. Selain itu, mereka juga aktif dalam menyelenggarakan kegiatan seperti cerdas cermat sadar hukum antar pelajar dan harmonisasi rancangan peraturan daerah untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat

2. Dengan dukungan dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan JDIH Kabupaten Mimika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum yang akurat dan terpercaya.

1. **METODE PEMBAHARUAN**

    1. **Sebelum penerapan inovasi**

        Sebelum adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi dokumentasi dan penyebaran informasi hukum tergolong tidak terkoordinasi dan terbatas. Beberapa hal yang menjadi tantangan saat itu antara lain:

        1. Dokumen hukum tersebar di berbagai instansi
        2. Akses masyarakat terhadap informasi hukum sangat terbatas
        3. Risiko inkonsistensi dan duplikasi peraturan
        4. Transparansi rendah
        5. Kesulitan dalam penyusunan kebijakan baru
        6. Dokumen-dokumen yang diarsipkan semuanya tidak di kelola dengan baik dalam satu system; keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum tidak tertata karena kondisi gudang yang tidak memadai sehingga pengarsipan kurang aman karena di tumpuk di dalam karton sehingga bisa tercecer, hilang dan terbakar.
        7. OPD maupun Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan dokumen hukum secara cepat, tepat dan up-to-date.

Tidak ada sistem terpusat untuk menyimpan dan mengelola produk hukum daerah seperti peraturan daerah, keputusan bupati, atau surat edaran, sehingga sulit dicari ketika dibutuhkan.

Masyarakat umum, aparat desa, bahkan aparatur sipil negara kesulitan mengakses regulasi atau produk hukum yang berlaku karena tidak tersedia secara digital maupun publik.

Karena minimnya dokumentasi terpusat, sering terjadi tumpang tindih kebijakan, atau kesulitan dalam menelusuri aturan yang masih berlaku dan yang sudah dicabut.

Ketidaktersediaan dokumen hukum secara terbuka menghambat transparansi pemerintahan, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan administrasi.

Tanpa basis data hukum yang lengkap, proses pembuatan kebijakan atau peraturan baru menjadi tidak efektif karena minimnya referensi terhadap peraturan yang sudah ada.

2. **Sesudah penerapan inovasi**

Setelah terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika, kondisi pengelolaan dan akses terhadap dokumen hukum mengalami peningkatan signifikan. Berikut ini adalah beberapa perubahan positif yang terjadi:

1. Sentralisasi Dokumen Hukum

Semua produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati kini terdokumentasi secara sistematis dalam satu sistem digital, yaitu di situs resmi jdih.mimikakab.go.id.

2. Akses Publik yang Mudah dan Transparan

Masyarakat, lembaga, maupun aparat pemerintahan kini dapat dengan mudah mencari dan mengunduh dokumen hukum secara online di https://jdih.mimikakab.go.id tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

3. Meningkatkan Kualitas Kebijakan

Dengan referensi hukum yang lengkap dan terdokumentasi, pembuatan regulasi baru menjadi lebih konsisten dan terhindar dari tumpang tindih atau duplikasi peraturan.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

JDIH membantu mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sesuai prinsip good governance. Hal ini turut mendukung pengawasan publik terhadap kebijakan daerah.

5. Peningkatan Kapasitas SDM Hukum

Melalui pelatihan dan kerja sama dengan JDIHN pusat dan instansi lain, kapasitas aparatur hukum di Mimika juga meningkat, baik dalam pengelolaan dokumen maupun pelayanan publik.

6. Penghargaan Nasional

Sebagai hasil dari pengelolaan yang baik, pada tahun 2023 Kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik ke-8 dan tahun 2024 meraih penghargaan terbaik ke-6 secara nasional, sebuah pencapaian penting dalam sektor hukum daerah.

Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di Kabupaten Mimika membawa transformasi besar dalam tata kelola dokumen hukum dan memperkuat posisi hukum daerah dalam melayani masyarakat.

1. **KEUNGGULAN/KEBAHARUAN**

   Aplikasi **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**, khususnya seperti yang diterapkan di Kabupaten Mimika, memiliki sejumlah **keunikan, karakteristik, keunggulan, dan kelebihan** yang membuatnya sangat bermanfaat, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Berikut penjelasannya:

   Keunikan dan Karakteristik JDIH

2. **Sistem Terintegrasi Nasional**
   JDIH merupakan bagian dari sistem nasional yang dibina oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), sehingga tiap aplikasi daerah (seperti Mimika) terhubung dengan portal nasional: jdihn.go.id.
3. **Spesifik untuk Produk Hukum Daerah**
   Aplikasi ini menampung seluruh peraturan daerah dan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Perda, Perbup, Keputusan Bupati, dsb).
4. **Berbasis Digital dan Online**
   Dirancang untuk diakses oleh siapa saja secara daring, sehingga informasi hukum bisa dijangkau masyarakat luas kapan saja dan dari mana saja.
5. **Antarmuka Sederhana dan Fungsional**
   Aplikasi JDIH memiliki antarmuka yang user-friendly, dengan fitur pencarian cepat, klasifikasi jenis dokumen, dan opsi unduh langsung.

Keunggulan dan Kelebihan Aplikasi JDIH

Aspek	Keunggulan
Transparansi	Memberikan akses publik terhadap dokumen hukum, mendukung pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
Efisiensi	Mempercepat pencarian dokumen hukum, mengurangi birokrasi pencarian manual.
Ketersediaan Dokumen	Produk hukum terdokumentasi lengkap, sistematis, dan mudah dilacak (dengan metadata: tahun, jenis, nomor, bidang hukum).
Kepastian Hukum	Membantu masyarakat dan pemerintah mengetahui regulasi yang berlaku, sehingga mencegah pelanggaran karena ketidaktahuan hukum.
Pengembangan Berkelanjutan	Aplikasi JDIH dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur pencarian cerdas, indeksasi dokumen, atau integrasi dengan sistem pelayanan lainnya.
Standar Nasional	Aplikasi mengikuti pedoman nasional dari JDIHN, menjamin kualitas dan keseragaman struktur data hukum antar wilayah.

Contoh Fitur Unggulan Aplikasi JDIH Mimika

- Pencarian berdasarkan jenis dokumen atau tahun
- Unduhan dokumen hukum dalam format PDF
- Link antar dokumen hukum yang saling terkait
- Berita hukum lokal dan pembaruan regulasi

Dengan semua kelebihan ini, JDIH bukan hanya alat dokumentasi hukum, tapi juga bagian penting dari infrastruktur digital hukum daerah.

1. **CARA KERJA INOVASI**

Berikut adalah penjelasan **cara kerja, tahapan kerja, dan prosedur kerja JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)** yang umum diterapkan di instansi pemerintah:

1. Cara Kerja JDIH

JDIH bekerja sebagai sistem jaringan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi yang terkoordinasi secara nasional. Cara kerjanya melibatkan:

- Pengumpulan dan pengelolaan dokumen hukum oleh unit-unit dokumentasi hukum di tiap instansi.
- Integrasi antar-institusi melalui sistem berbasis web (portal JDIH lokal dan nasional).
- Penyediaan akses publik secara gratis terhadap dokumen hukum.

2. Tahapan Kerja JDIH

Berikut tahapan kerja dari awal hingga dokumen hukum tersedia untuk publik:

a. Perencanaan Dokumen

- Mengidentifikasi dokumen hukum yang perlu dikumpulkan atau diterbitkan.
- Menentukan standar dan format digitalisasi dokumen.

b. Pengumpulan Dokumen

- Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, keputusan, atau dokumen hukum lainnya yang diterbitkan oleh instansi.

c. Pengolahan dan Digitalisasi

- **Klasifikasi**: Menentukan jenis dokumen hukum (UU, PP, Perda, dll).
- **Pemberian metadata**: Tahun, nomor, tentang apa, dan instansi penerbit.
- **Scanning** dan pengubahan ke format PDF/legal text.

d. Penginputan ke Sistem JDIH

- Mengunggah dokumen ke dalam sistem JDIH instansi menggunakan aplikasi/portal berbasis web.
- Memastikan link dan metadata bisa dibaca mesin pencarian (indexing).

e. Verifikasi dan Validasi

- Pengecekan ulang isi dokumen untuk menjamin keaslian dan kesesuaian dengan versi resmi.
- Pemberian status hukum (misal: berlaku, dicabut, diubah).

f. Publikasi

- Dokumen dipublikasikan di website JDIH Kabupaten Mimika (https://jdih.mimikakab.go.id).
- Dokumen juga terintegrasi ke portal nasional JDIH (https://jdihn.go.id).

g. Pemutakhiran Data

- Update rutin jika ada perubahan, pencabutan, atau penambahan dokumen hukum baru.

3. Prosedur Kerja JDIH

Prosedur kerja ini bisa bervariasi antar-instansi, tapi secara umum melibatkan:

Langkah	Kegiatan	Pelaksana
1	Penerimaan dokumen hukum	Bagian Hukum
2	Identifikasi jenis & status hukum	Pengelola JDIH
3	Digitalisasi	Operator JDIH
4	Input metadata & unggah ke sistem	Operator JDIH
5	Verifikasi isi dan legalitas	Koordinator JDIH/Hukum
6	Publikasi dokumen ke situs JDIH	Admin situs
7	Backup dan sinkronisasi ke JDIHN	Admin IT / Koordinator
8	Laporan bulanan atau tahunan kegiatan JDIH	Koordinator JDIH

1. **HASIL INOVASI**

   Hasil dari kegiatan JDIH adalah berbagai produk dan output yang mendukung keterbukaan, keteraturan, dan kemudahan akses terhadap informasi hukum. Berikut ini adalah hasil utama dari pelaksanaan JDIH:

   1. Tersedianya Dokumen Hukum Secara Terpadu

- Produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan lainnya tersedia dalam satu sistem yang mudah diakses.
- Format digital (PDF/legal text) dan terstandarisasi.

2. Website atau Portal JDIH Instansi

- Setiap instansi memiliki portal JDIH sendiri (misalnya: jdih.kemenkumham.go.id, jdih.setkab.go.id, jdih.jabarprov.go.id).
- Terdapat fitur pencarian, klasifikasi, dan download dokumen hukum.

3. Integrasi ke Portal JDIH Nasional (jdihn.go.id)

- Semua dokumen hukum dari instansi pemerintah dan daerah tergabung dalam satu portal nasional.
- Memudahkan pencarian lintas instansi dan provinsi.

4. Meningkatkan Kepastian Hukum dan Akses Publik

- Hasil JDIH mendukung:
  - Transparansi pemerintahan
  - Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat
  - Penegakan hukum yang lebih akurat
  - Pendidikan hukum untuk mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum

5. Laporan dan Evaluasi Kinerja JDIH

- Setiap instansi menyusun laporan kegiatan dan capaian JDIH (bulanan/tahunan).
- Digunakan oleh BPHN (Kemenkumham) untuk penilaian dan pembinaan.

6. Penghargaan JDIH

- Instansi yang aktif dan unggul dalam pengelolaan JDIH berpotensi mendapat penghargaan dari BPHN, seperti:
  - JDIH terbaik nasional

    Pada tahun 2023, kabupaten Mimika meraih penghargaan sebagai pengelola JDIHN terbaik kedelapan dan tahun 2024 di Indonesia.

  - JDIH inovatif
  - JDIH responsif terhadap pemutakhiran hukum

1.11 Tujuan Inovasi Daerah

1. **TUJUAN INOVASI**

Tujuan utama dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Mimika adalah untuk menyediakan akses yang mudah, cepat, dan transparan terhadap informasi hukum bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan JDIH Kabupaten Mimika adalah:

1. Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Hukum
   - Mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen hukum seperti peraturan daerah, keputusan bupati, dan peraturan lainnya secara online melalui portal JDIH Kabupaten Mimika.
2. Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
   - Dengan tersedianya informasi hukum yang lengkap dan terkini, JDIH membantu menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
3. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah
   - Memberikan kepastian hukum melalui penyebarluasan informasi peraturan yang berlaku, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
   - Dengan adanya JDIH, pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang diperlukan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
5. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
   - JDIH juga berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan menyediakan informasi hukum yang relevan dan up-to-date, seperti yang tercermin dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020-2035.

1.12 Manfaat yang Diperoleh

1. **MANFAAT INOVASI**

   Berikut adalah manfaat JDIH Kabupaten Mimika bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya:

   1. Meningkatkan Akses Informasi Hukum

- Masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk hukum daerah, seperti:
  - Peraturan Daerah (Perda)
  - Peraturan Bupati (Perbup)
  - Keputusan dan Instruksi Bupati
  - dll
- Tersedia secara online dan gratis melalui portal resmi: jdih.mimikakab.go.id

2. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan Pemerintah

- Masyarakat bisa mengetahui regulasi yang sedang atau telah berlaku.
- Memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah.

3. Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum

- Warga dan pelaku usaha bisa menjalankan aktivitas sesuai aturan yang benar.
- Menghindari pelanggaran hukum karena tidak tahu aturan.

4. Mempermudah Kerja Pemerintah Daerah

- Aparatur sipil negara (ASN) dapat dengan cepat mencari dasar hukum dalam:
  - Penyusunan program
  - Penyusunan anggaran
  - Pengambilan keputusan

5. Mendukung Pendidikan dan Penelitian Hukum

- Mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dapat menggunakan JDIH sebagai referensi resmi dalam kajian hukum lokal di Mimika.

6. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemerintah

- Mengurangi penggunaan kertas dan waktu pencarian dokumen.
- Mendukung program e-Government dan digitalisasi layanan publik.

7. Penguatan Sinergi dengan JDIH Nasional

- JDIH Kabupaten Mimika terhubung dengan portal JDIH Nasional (jdihn.go.id), yang memperluas jangkauan akses dokumen ke seluruh Indonesia.

1.13 Hasil Inovasi

1. **DAMPAK INOVASI**

   Berikut adalah dampak dari keberadaan JDIH Kabupaten Mimika, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, pemerintah daerah, dan pembangunan hukum:

   1. Meningkatnya Transparansi Hukum

- Keberadaan JDIH mendorong budaya terbuka dan transparan dalam penyusunan serta penyebaran peraturan daerah.

- Warga Mimika kini dapat mengetahui isi peraturan tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

- Aparatur pemerintah memiliki akses cepat ke dokumen hukum resmi, sehingga pelayanan publik bisa dilakukan dengan dasar hukum yang kuat dan akurat.

3. Terciptanya Kepastian Hukum

- Dokumen hukum yang tersedia secara digital dan resmi membantu masyarakat dan pelaku usaha untuk beraktivitas sesuai hukum yang berlaku, mengurangi potensi pelanggaran karena ketidaktahuan.

4. Mendorong Partisipasi Publik

- Masyarakat lebih mudah mengkritisi, mempelajari, atau memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah karena dapat membaca langsung regulasi yang diterbitkan.

5. Mendukung Pembangunan Daerah

- Produk hukum yang tertata rapi dalam JDIH mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, karena regulasi sudah terdokumentasi dan tersedia secara digital.

6. Meningkatnya Citra Pemerintah Daerah

- Keberhasilan JDIH Mimika meraih penghargaan nasional (peringkat 8 nasional tahun 2023 dan peringkat 6 nasional tahun 2024) menunjukkan komitmen dan kinerja profesional dalam dokumentasi hukum.

- Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan lembaga pusat terhadap Kabupaten Mimika.

7. Memberikan Edukasi dan Literasi Hukum

- Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa di Mimika terbantu dalam belajar hukum daerah karena sumber resminya sudah tersedia secara daring.

Dampak-dampak ini menunjukkan bahwa JDIH bukan hanya sekadar arsip digital, tapi juga alat strategis dalam membangun tata kelola hukum yang baik di daerah.

No	Indikator	Informasi	Data Pendukung

1	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*	Lebih dari 30	• **Tentang** SK BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2024 TTG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN MIMIKA TA 2024
2	Dukungan anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T1 dan T-2	• **Tentang** ANGGARAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023 • **Tentang** ANGGARAN INOVASI DAERAH TAHUN 2024 • **Tentang** ANGGARAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025
3	Bimtek inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT	• **Tentang** BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGELOLA JDIH KAB. MIMIKA TAHUN 2024 • **Tentang** JDIH KABUPATEN MIMIKA MELAKUKAN STUDY BANDING KE JDIH KABUPATEN BANYUWANGI • **Tentang** JDIH KABUPATEN MIMIKA MELAKUKAN KUNJUNGAN KE JDIH KEMENTRIAN KOORDINASI KEMARITIMAN DAN INVESTASI • **Tentang** EVALUASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGELOLA JDIH BERSAMA TENAGA AHLI JDIHN BPHN
4	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• **Tentang** RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 • **Tentang** RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 • **Tentang** RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025
5	Pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	• **Tentang** PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN MIMIKA
6	Jejaring inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• **Tentang** NOMOR 10 TAHUN 2024 TTG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN MIMIKA TA 2024
7	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• **Tentang** PENYEBARLUASAN INFORMASI LEWAT MEDIA SOSIAL DAN MEDIA BERITA
8	Pedoman teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online	• **Tentang** PEDOMAN TEKNIS YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE

9	Kemudahan informasi layanan	Layanan melalui 3 media atau lebih	• **Tentang** INFORMASI LAYANAN LEWAT WA • **Tentang** INFORMASI LAYANAN LEWAT ONLINE • **Tentang** INFORMASI LAYANAN LEWAT MANUAL • **Tentang** INFORMASI LAYANAN LEWAT EMAIL • **Tentang** INFORMASI LAYANAN LEWAT FB • **Tentang** INFORMASI LAYANAN LEWAT IG • **Tentang** INFORMASI LAYANAN LEWAT TWITTER
10	Kecepatan penciptaan inovasi*	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• **Tentang** PROPOSAL INOVASI DAERAH
11	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• **Tentang** STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM
12	Penyelesaian layanan pengaduan	86%	• **Tentang** REKAPITULASI PENGADUAN INOVASI • **Tentang** CONTOH PENGELESAIAN PENGADUAN
13	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/ daring Contoh : pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, super-app, dll	• **Tentang** PELAKSANAAN KERJA SUDAH DIDUKUNG SISTEM INFORMASI ONLINE
14	Kemanfaatan inovasi*	Cakupan penerima manfaat 201 orang atau lebih	• **Tentang** DATA PENGUNJUNG
15	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• **Tentang** HASIL LAPORAN MONEV EKSTERNAL
16	Integrasi Layanan	Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi/mobile (android atau ios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	• **Tentang** INTEGRASI LAYANAN
17	Kualitas inovasi daerah*	Memenuhi 5 unsur substansi	
18	Regulasi Inovasi Daerah*	Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Daerah	• **Tentang** PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 72 TAHUN 2022 TTG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA